



Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Napan Ditinjau Dari Perspektif Hukum

Ferdinandus N. Lobo¹, Yohanes Arman², Elroswit Teresa Gae Soro³

Program Strudi Hukum, Universitas Widya Mandira, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: Ferdinandlolo@UNWIRA.ac.id¹, nanaarman54@gmail.com²

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 08 Januari 2026

ABSTRACT

The Real Work Lecture Program (KKN) is a form of education in the form of community service. In this service, students are given learning experiences to live in the midst of the community outside the campus and directly identify and address the development problems faced. Supervision and service of people crossings (serving, supervising people with passport documents) Supervision of crossings of goods transportation facilities (public and private transportation). Other functions. Facilitating the economic growth of the community (contributing to the regional economy). Security and supervision management. Counseling on procedures and regulations for exporting goods to Timor Leste Integrated coordination between PLBN and immigration for administrative completeness of the community in exporting goods to Timor Leste (Passport) Development of superior commodities in the Napan village area (for export to Timor Leste). Developing tourist areas at PLBN. Local exporter policies to support the local economy. Development of local economic centers (border markets) Cooperation between the central government and regional governments.

Keywords: Function of PLBN

ABSTRAK

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dalam pengabdian ini mahasiswa diberikan pengalaman belajar untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Pengawasan dan pelayanan perlintasan orang (melayani, mengawasi orang dengan dokumen paspor) Pengawasan perlintasan sarana angkutan barang (angkutan umum maupun pribadi). Fungsi lain. Fasilitasi pertumbuhan ekonomi Masyarakat (memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah). Keamanan dan pengelolaan pengawasan. Penyuluhan prosedur serta aturan-aturan ekspor barang ke Timor Leste Koordinasi terpadu antara PLBN dan imigrasi untuk kelengkapan administratif Masyarakat dalam melakukan ekspor barang ke Timor Leste (Paspor) Pengembangan komoditas unggulan daerah desa napan (untuk ekspor ke Timor Leste). Mengembangkan kawasan wisata di PLBN. Kebijakan ekspor local untuk mendukung perekonomian local. Pembangunan pusat ekonomi lokal (pasar perbatasan) Kerjasama pemda dan pemda.

Kata Kunci: Fungsi PLBN

PENDAHULUAN

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dalam pengabdian ini mahasiswa diberikan pengalaman belajar untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Katolik Widya Mandira merupakan salah satu implikasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. KKN bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman belajar yang baru untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat sasaran, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam bidang pembangunan. Hal ini selaras dengan fungsi perguruan tinggi sebagai agen pembaharuan. Oleh karena itu, mahasiswa harus dapat bertindak sebagai jembatan (komunikator) dalam proses pembangunan dan penerapan IPTEK pada khususnya.

KKN yang dilaksanakan harus memenuhi empat prinsip, yaitu dapat dilaksanakan (feasible), dapat diterima (acceptable), berkesinambungan (sustainable) dan partisipatif. Secara garis besar tahap pelaksanaan KKN terbagi atas 3 tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Pada tahap pelaporan, laporan yang dibuat terdiri atas dua jenis laporan yaitu, laporan kelompok yang disusun oleh kelompok mahasiswa dan laporan individu yang disusun oleh satu orang mahasiswa. Observasi dilakukan dengan metode: (1) tanya jawab, (2) dokumentasi, dan (3) melihat ke lapangan secara langsung. Berdasarkan hasil observasi maka ditentukan program kerja KKN yang akan dilaksanakan meliputi program fisik, dan program non fisik. Desa Napan adalah desa strategis yang terletak di wilayah Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Desa ini memiliki peran vital sebagai salah satu titik perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Leste, dengan keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan.

Desa Napan terletak di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU. Desa ini berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste di sebelah Barat. Batas-batas administrasi lainnya meliputi Desa Banain B (Utara), Desa Tes (Selatan), dan Desa Sainoni (Timur).

Luas desa diperkirakan berkisar antara ±6 km² hingga 70,70 km² (mengacu pada data statistik kecamatan). Wilayah ini umumnya merupakan area perbukitan, sesuai dengan karakteristik daerah perbatasan di TTU. Pola pemukiman seringkali tersebar di sepanjang jalan dan menyesuaikan kontur lahan. Tipologi utama Desa Napan meliputi Perladangan, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan, menunjukkan basis utama sumber daya alamnya. Desa Napan mengalami iklim tropis yang ditandai dengan dua musim utama: Musim Hujan dan Musim Kemarau. Berdasarkan data tahun tertentu (misalnya data Profil Desa Tahun 2022), jumlah penduduk Desa Napan sekitar 1.285 jiwa dengan sekitar 320 Kepala Keluarga (KK).

Mayoritas penduduk di Kabupaten TTU, termasuk Napan, didominasi oleh populasi usia produktif (piramida penduduk muda/ekspansif), yang membutuhkan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

Desa Napan secara administratif terbagi menjadi 3 Dusun, 6 Rukun Tetangga (RT), dan 3 Rukun Warga (RW).

Jumlah Penduduk Desa Napan berdasarkan Profil Desa tahun 2022 sebanyak 1.285 jiwa yang terdiri dari 628 laki-laki dan 657 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk rata-rata adalah melalui usaha tani. Utama penduduk adalah di sektor primer, yaitu Pertanian (berladang/berkebun) dan Peternakan, sesuai dengan tipologi desa. Meliputi hasil panen dari lahan pertanian, serta hasil ternak. Terdapat juga potensi untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil (UMK), apalagi dengan dukungan program desa binaan dari perbankan lokal. Selain dari hasil bumi, pergerakan ekonomi di Desa Napan sangat dipengaruhi oleh aktivitas lintas batas yang dimediasi oleh PLBN Napan. Kehadiran PLBN ini membuka peluang perdagangan dan pertukaran komoditas yang menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga lokal. Pembangunan infrastruktur perbatasan telah berupaya meningkatkan kesejahteraan. Namun, isu-isu terkait kemiskinan dan ketergantungan pada sumber daya alam tetap menjadi tantangan, yang memerlukan intervensi pengembangan ekonomi berkelanjutan. Masyarakat Desa Napan kental dengan kearifan lokal Suku Atoni Meto. Ikatan sosial dan kekerabatan seringkali melintasi batas negara, yang terkadang memunculkan dinamika unik dalam aktivitas lintas batas. Struktur pemerintahan desa (Kepala Desa dan perangkat) berjalan sesuai Undang-Undang. Namun, dalam penyelesaian beberapa masalah sosial, hukum adat masih memiliki peran penting dan dihormati di samping hukum positif negara. Desa Napan menjadi pusat aktivitas lintas batas informal dan formal. Meskipun PLBN memberikan peluang ekonomi, ia juga berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti ketegangan sosial (akibat masuknya pendatang) atau konflik ternak yang melintasi perbatasan dan merusak lahan pertanian. Nilai-nilai Nasionalisme menjadi isu penting dan terus dipelihara mengingat status Napan sebagai wilayah perbatasan negara.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode observasi lapangan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu tanya jawab (wawancara), dokumentasi, serta pengamatan langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi masalah pembangunan secara riil. Selain itu, penulis menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis fungsi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan, kebijakan pemerintah, dan pola kerja sama masyarakat yang didukung oleh data sekunder dari profil desa serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi PLBN dalam mendukung Perekonomian Masyarakat

Pos lintas batas negara di Indonesia adalah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang merupakan tempat pemeriksaan dan pelayanan keluar masuk orang

dan barang dari dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan paspor dan/atau pas lantas batas. PLBN Terpadu ini berada di kawasan perbatasan wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Negara Indonesia dengan negara lain. Dalam hal perbatasan dengan negara lain di darat, kawasan ini terletak di sebuah kecamatan.

PLBN merupakan peningkatan fungsi Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) yang memiliki dan memberikan pelayanan di bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, dan administrasi pengelolaan. PLBN menjadi sistem utama yang melayani aktivitas masyarakat perbatasan khususnya yang berhubungan dengan aktivitas lintas batas.

Berdasarkan Pembukaan UUD1945 alinea ke 4 tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Fungsi PLBN

Berdasarkan peraturan badan pengelolaan perbatasan no 1 tahun 2021 fungsi PLBN:

- Pengawasan dan pelayanan perlintasan orang (melayani, mengawasi orang dengan dokumen paspor)
- Pengawasan perlintasan sarana angkutan barang (angkutan umum maupun pribadi)
- Fungsi lain
 - Fasilitasi pertumbuhan ekonomi Masyarakat (memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah)
 - dan pengelolaan pengawasan
- Kerjasama (dalam membangun relasi antara PLBN dan Masyarakat)
 - Kerjasama adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses saling membantu untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut teori ekonomi, kerjasama muncul dari alasan keuntungan pribadi dari setiap orang yang terlibat. Namun, para ahli juga menyoroti aspek psikologis dan sosial dalam teori kerjasama. Salah satu teori yang sangat dikenal dalam studi kerjasama adalah teori permainan. Teori ini digunakan dalam konteks ilmu ekonomi maupun sosiologi. Dalam teori permainan, kerjasama dianggap sebagai strategi yang dapat menghasilkan keuntungan maksimum jika diterapkan oleh semua individu yang terlibat. Namun, teori ini juga menunjukkan bahwa kerjasama dapat rentan terhadap perilaku oportunistis yang mencoba memanfaatkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan bersama. Penyuluhan prosedur serta aturan-aturan ekspor barang ke Timor Leste
 - Koordinasi terpadu antara PLBN dan imigrasi untuk kelengkapan administratif Masyarakat dalam melakukan ekspor barang ke Timor Leste (Paspor)
 - Pengembangan komoditas unggulan daerah desa napan (untuk ekspor ke Timor Leste)
 - Mengembangkan kawasan wisata di PLBN

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat lewat PLBN

Kebijakan daerah adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Kebijakan daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengatasi permasalahan yang ada di daerah. Kebijakan ini sering kali disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan spesifik daerah yang bersangkutan.

Jenis-jenis Kebijakan Daerah

- a) Kebijakan daerah dapat dibedakan berdasarkan sektor yang dikelola, antara lain:
 - Kebijakan Ekonomi Daerah Kebijakan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Ini mencakup kebijakan mengenai pajak daerah, investasi, pengembangan UMKM, pengelolaan sumber daya alam, serta pengembangan industri dan sektor ekonomi unggulan lokal. Contoh kebijakan ekonomi daerah adalah pemberian insentif bagi investor yang membangun pabrik atau usaha di daerah tersebut.
 - Kebijakan Pendidikan Daerah Kebijakan pendidikan daerah berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan untuk masyarakat. Kebijakan ini mencakup pembangunan fasilitas pendidikan, pelatihan bagi tenaga pengajar, serta peningkatan kualitas kurikulum di sekolah-sekolah daerah. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua anak di daerah tersebut mendapatkan pendidikan yang baik dan merata.
 - Kebijakan Kesehatan Daerah Kebijakan kesehatan daerah mencakup pengelolaan sistem kesehatan di tingkat lokal, seperti fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas akses layanan kesehatan, serta mengurangi angka kematian dan penyakit yang dapat dicegah. Program-program kesehatan yang dapat diterapkan di daerah meliputi imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan peningkatan fasilitas rumah sakit atau puskesmas.
 - Kebijakan Infrastruktur Daerah Kebijakan infrastruktur daerah mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan sistem transportasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup warga daerah tersebut. Pembangunan infrastruktur yang baik juga akan mempercepat aksesibilitas ke layanan publik dan menciptakan daerah yang lebih maju.
 - Kebijakan Lingkungan Hidup Daerah Kebijakan lingkungan hidup daerah berfokus pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan di tingkat lokal. Kebijakan ini melibatkan pengelolaan sampah, perlindungan sumber daya alam, pengurangan polusi, serta mitigasi dampak perubahan iklim. Contoh kebijakan lingkungan hidup daerah adalah kebijakan daur ulang sampah dan pembentukan kawasan hijau di kota.

- f) Kebijakan Sosial Daerah Kebijakan sosial daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, dan penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan ini bisa mencakup penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin, bantuan pangan, serta program pemberdayaan masyarakat.
- g) Kebijakan Pemerintahan Daerah Kebijakan pemerintahan daerah berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan anggaran daerah, serta pelayanan publik. Kebijakan ini memastikan bahwa pemerintahan daerah berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan Pembukaan UUD1945 alinea ke 4 tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. (1) Fungsi PLBN, Berdasarkan peraturan badan pengelolaan perbatasan no 1 tahun 2021 fungsi PLBN: Pengawasan dan pelayanan perlintasan orang (melayani, mengawasi orang dengan dokumen paspor), Pengawasan perlintasan sarana angkutan barang (angkutan umum maupun pribadi), Fungsi lain, Fasilitasi pertumbuhan ekonomi Masyarakat (memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah), Keamanan dan pengelolaan pengawasan. (2) Kerjasama (dalam membangun relasi antara PLBN dan Masyarakat), Penyuluhan prosedur serta aturan-aturan ekspor barang ke Timor Leste, Koordinasi terpadu antara PLBN dan imigrasi untuk kelengkapan administratif Masyarakat dalam melakukan ekspor barang ke Timor Leste (Paspor), Pengembangan komoditas unggulan daerah desa napan (untuk ekspor ke Timor Leste), Mengembangkan kawasan wisata di PLBN (3) Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat lewat PLBN (UU NO 7 tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan), Pasal 7 tarif ppn 0% (ekspor barang kena pajak berwujud), Kebijakan ekportir local untuk mendukung perekonomian local, Pembangunan pusat ekonomi lokal (pasar perbatasan) Kerjasama pemprov dan pemda

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih dapat disampaikan kepada pihak sponsor atau pendanaan, dapat juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan orang-orang terkasih (hindari ucapan terimakasih yang berbunga-bunga) serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- https://tanah.com/info/kebijakan-daerah-penjelasan-pengertian-istilah-makna-arti_kebijakan-daerah-adalah/
- <https://tambahpinter.com/teori-kerjasama-menurut-para-ahli>

<https://search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210US91215G0&p=PENGERTIAN+KERJASAMA+MENURUT+PARA+AHLI>